

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL

Khotimah

Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Email: khotimahimah91@yahoo.co.id

Januarizal

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Dumai

Email: ijan_dumai@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan Multikultural adalah satu model pendidikan yang mencoba membangun sikap menghargai perbedaan dan kerja sama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keragaman etnis, suku, budaya, dan agama. Dalam konteks pendidikan Islam, ini relevan dengan tugas kemanusiaan yang dijadikan sebagai tujuan pendidikan Islam, yaitu sebagai hamba (abd) dan sebagai khalifah. Tugas kebambaan, manusia secara niscaya tidak dapat menafikan realita yang ada di sekitarnya. Sedangkan tugas kekhalfahannya menuntut aktualisasi ide-ide ketuhanannya dalam praktek kehidupan sehari-hari, bagi sesama maupun alam semesta.

Kata kunci: *Pendidikan, Multikulturalisme, Islam dan Pendidikan multikultural*

Pendahuluan

Masyarakat modern dihadapkan pada masalah adanya kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Di abad modern ini terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kehidupan. (1) di bidang budaya, masyarakat abad ke 21 sedang menuju pasca-ideologis, yakni sebuah era yang lebih berorientasi pada nilai pluarlisme dan multikulturalisme. (2) dalam bidang agama, lambat atau cepat, suatu masyarakat dunia yang

multiconfensional akan muncul. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang bisa memeluk banyak agama, tetapi harus menumbuhkan sebuah pengakuan bahwa kebaikan itu ada di banyak agama dan pemeluk agama (Jainuri, 2005).

Indonesia sebagai Negeri dan Bangsa, merupakan salah satu negara yang multikultural terbesar didunia, Hal ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada di wilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari

300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen protestan, hindu, budha, konghucu, serta berbagai macam kepercayaan (Yakin, 2005).

Dilihat dari berbagai segi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (plural) dari segi etnis ada 1072 suku .dimana suku-suku yang ini membentuk suku-suku besar dan kecil. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan seluruh wilayah Nusantara, dari segi pulau yang dihuni terdapat sekitar 13.000 lingkungan kepulauan. Dari segi sejarah politik local terdapat puluhan bahkan ratusan sistem kerajaan-kerajaan, kesukuan lama yang berpengaruh terhadap sistim stratifikasi social dan adat istiadat setempat. Konteks Indonesia yang plural ini barangkali bisa menyebabkan rawan terhadap konflik.

Keragaman ini, dalam banyak hal telah dan akan mengalami berbagai hambatan dalam membangun keharmonisan penduduk Indonesia yang multi-etnik, multi-agama, dan multi-kultur.

Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Seperti korupsi, kolusi nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa

kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu. Contoh konkrit terjadinya tragedi pembunuhan besar-besaran terhadap pengikut partai PKI pada tahun 1965, kekerasan etnis cina di Jakarta pada bulan Mei 1998 dan perang antara Islam Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003.

Sifat realitas kekerasan dan konflik sosial yang aktual dan menyebar, membenarkan bahwa kekerasan hampir menjadi setelan mental (*mind-set*) dan nalar kolektif masyarakat maupun individu tentang multikulturalitas kebangsaan masih terkooptasi oleh *logosentrisme*, tafsir hegemonik yang sarat akan prasangka, kecurigaan, bias, kebencian, dan reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya (*the other*), serta pemahaman tentang teologi yang masih sangat eksklusif yang tumbuh dan berkembang di internal umat beragama. Akibatnya, ikatan-ikatan sosial (*societal bonds*) melalui kolektivitas dan kerjasama hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri (*in group*), tidak berlaku terhadap kelompok lain (Hily, 2003).

Di atas fakta tersebut, di sini gagasan multikulturalisme menjadi suatu tawaran gerakan sosial-budaya baru yang patut ditimbang dan menjadi alternative untuk mengatasi problem bangsa yang pluralitas dan multi-kultur, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sebagai sebuah konsep,

multikulturalisme menekankan dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kelompok dalam ranah kebudayaan (Suparlan, 2006).

Multikulturalisme, sebagai sebuah gerakan sosial-budaya megedepankan pengakuan terhadap masing-masing entitas perbedaan dengan sendirinya menghendaki dan mempunyai karakter yang beranekaragam identitas, sehingga masyarakat dapat mengartikulasikan dan mengevaluasi tradisi mereka dalam diskursus public yang rasional. Gerakan ini (multikulturalisme) mengusung semangat yang sangat penting yakni *living together as one society* (Jahroni, 2003).

Gerakan sosial-budaya ini mengusung konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, etnis, suku, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan bangunan pemahaman kepada kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural).

Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *pro-existence* bukan sekedar *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahendrawati dan Syafi'i, 2001).

Gerakan multikulturalisme melihat keberagaman ini sebagai pluralitas identitas dan sebagai kondisi natural eksistensi manusia. Multikulturalisme, jika dinisbahkan pada Amerika dalam upaya mengatasi persoalan keragaman budaya adalah semacam *melting-pot* (tempat bercampur), di mana masyarakat dengan berbagai pluralitas dengan ciri-cirinya yang unik dan khas bercampur menjadi satu sehingga bisa menumbuhkan *generic culture*. Identitas, dalam kerangka pluralitas dilihat sebagai produk kumpulan tradisi, adat-istiadat, praktik, nilai, norma, dan makna.

Namun sejatinya, multikultural sebagai fakta keanekaragaman berbeda dengan konsep multikulturalisme sebagai gagasan normatif. Sebagai konsep normatif, multikulturalisme sendiri bukan konsep yang netral, kelahirannya sendiri bertolak dari situasi yang berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Secara historis, multikulturalisme dilahirkan dari rahim negara-negara yang memiliki persoalan rasial yang akut.

Hanya saja dalam perkembangan dewasa ini dan arus globalisasi, tepatnya globalisasi kultural, turut menjadi faktor yang signifikan dalam persoalan budaya. Dengan demikian, konsep multikulturalisme ini penting juga dilihat sebagai persoalan yang bakal menimpa negara bangsa modern saat ini yang semakin menyisakan keanekaragaman masyarakat yang terus berkembang, misalnya Indonesia.

Jika dilacak, embrio gagasan multikulturalisme secara filosofis telah digaungkan oleh Charles Taylor yang membicarakan tentang *Politic of Recognition* (politik pengakuan). Menurut Taylor, di bawah *politic of recognition* tuntutan kelompok warga minoritas terhadap hak-hak mereka adalah untuk dapat menentukan diri sebagai sebuah minoritas kultural. Mereka juga ingin mendapat hak-hak mereka dalam partisipasi pengambilan keputusan-keputusan public (Hardiman, 2002).

Sementara wacana Taylor bergerak dalam wilayah sosio-kultural, Will Kymlicka justru melangkah jauh lebih konkrit dalam ranah aplikatif politis tentang teori-teori hak, di mana hak-hak minoritas dimasukkan dalam bagian sistem hak-hak di dalam liberalisme. Menurut Kymlicka, politik multikulturalisme adalah politik tentang hak-hak minoritas.

Dari sini, Kymlicka memberikan syarat adanya suatu budaya mayoritas yang toleran dan terbuka yang bisa memberi fundamen bagi kebudayaan masyarakat yang multi-etnik dan liberal (Hardiman, 2002). Dalam konteks politik multikulturalisme, etnisitas diartikan sebagai warga sipil.

Berdasarkan permasalahan seperti diatas maka pendidikan multikulturalisme menawarkan satu alternatif dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada dimasyarakat.

Khususnya yang ada pada siswa seperti: keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan umur dan ras. Walaupun pendidikan multikultural merupakan pendidikan relatif baru di dalam dunia pendidikan.

Selanjutnya, dari aspek Islam sendiri, wacana multikulturalisme dapat dicermati dan dipahami melalui adanya teks-teks normatif baik al-Qur'an maupun al-hadith yang menunjukkan adanya kehidupan yang pluralitas dan multikulturalitas. Dalam tataran praktis kehidupan sosial, adanya budaya mayoritas (muslim) yang toleran dan terbuka yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial-budaya masyarakat muslim, terlebih yang dilakukan oleh muslim yang moderat.

Di mana Islam selalu menghargai dan menerima segala perbedaan dengan segala keunikannya dalam semua aspek kehidupan yang pluralitas. Oleh karenanya, Islam sebagai agama etika semestinya dapat menjadi faktor fundamen bagi membentuk dan mengembangkan masyarakat multicultural seperti Indonesia, melalui interaksi sosial, baik dalam internal masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim.

Dimensi multikulturalisme sebenarnya tersirat kuat dalam setiap agama. Setiap agama mempunyai nilai-nilai khas (partikular) dengan segala keunikannya dan nilai-nilai umum (universal) (Yakin, 2005). Dalam diri

setiap agama juga mengajarkan cinta kasih dan kebaikan. Begitu juga dengan Islam, sebagai agama rahmat bagi semesta alam, Islam memiliki perspektif yang konstruktif terhadap perdamaian dan kerukunan hidup. Dalam al-Qur'an, semua golongan manusia yakni kaum muslim, Yahudi, Nasrani, dan di luar keduanya, mempunyai

Sementara itu, inti dari cita-cita pendidikan, terutama pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang beriman cerdas kreatif dan memiliki keluhuran budi. Tugas utama pendidikan adalah upaya sadar yang mengantarkan manusia pada cita-cita tersebut dan pendidikan Islam juga memiliki fungsi mengarahkan kehidupan dan keberagaman manusia ke arah kehidupan yang ideal (Mulksan, 1993).

Jika upaya pendidikan mengalami kegagalan dalam mengantarkan manusia ke arah cita-cita manusiawi yang berdasar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, maka yang akan terjadi adalah tumbuhnya perilaku-prilaku negatif dan destruktif seperti kekerasan, ketidakpedulian sosial dan sebagainya.

Berdasarkan perilaku-prilaku destruktif tersebut yang sering muncul di negara Indonesia merupakan akibat dari belum munculnya pendidikan cerdas, kreatif dan berbudidiluhur. Orang yang cerdas akan selalu menggunakan nalar manusiawinya secara benar dan objektif dalam melihat realitas sosial, orang yang kreatif mempunyai pilihan-pilihan dalam

memenuhi dan menjawab persoalan hidupnya. Orang yang arif dan luhur budi (*akblaq al-karimah*) mampu menentukan pilihan yang paling tepat dan selalu menolak cara-cara kekerasan dalam mensikapi berbagai dilemma kehidupan. Kecerdasan dan kearifan yang bersumber pada daya kritis atas nilai diri dan sosial sehingga mampu memberikan sinaran yang selalu tumbuh terhadap kepedulian pada sesama (Mulksan, 2000).

Dalam pandangan Nurcholis Majid (1999) dengan mengutip pendapat Bernard Lewis, di antara tantangan modernitas dan globalisasi yang paling nyata adalah persoalan toleransi dan plural. Sebenarnya hal ini tidak menjadi persoalan pada generasi awal baik bagi umat Islam, Kristen maupun Yahudi. Lewis menunjukkan bahwa generasi Islam yang awal cenderung lebih toleransi jika dibandingkan dengan generasi Islam yang belakangan.

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mendiskusikan tentang bagaimana implikasi pendidikan multikultural ini, terhadap pendidikan Islam.

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Secara sederhana multikultural berarti "keberagaman budaya" (Featherstone, 2002). Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman

tersebut –baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda- yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multicultural (*multicultural*).

Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru.

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikultural. menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh

karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.

Diversitas dalam masyarakat modern bisa berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama dan menjadi semacam *common sense*. Perbedaan tersebut menurut Bikhu Parekh bisa dikategorikan dalam tiga hal - salah satu atau lebih dari tiga hal-, yaitu *pertama* perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku.

Kedua, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perpektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).

Sebagai sebuah gerakan, menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an multikulturalisme muncul pertama kali di

Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Setelah itu, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting yaitu,

Pertama multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini.

Gelombang *kedua*, adalah multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya (Tilaar, 2002): kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli/masyarakat adapt (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat (Jay, 2005).

Multikulturalisme gelombang kedua ini, menurut Steve Fuller (2002) pada gilirannya memunculkan tiga tantangan yang harus diperhatikan sekaligus harus diwaspadai, yaitu,

Pertama adanya hegemoni barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan. Komunitas, utamanya negara-negara berkembang,

perlu mempelajari sebab-sebab dari hegemoni barat dalam bidang-bidang tersebut dan mengambil langkah-langkah seperlunya mengatasinya, sehingga dapat sejajar dengan dunia barat.

Kedua, esensialisasi budaya. Dalam hal ini multikulturalisme berupaya mencari esensi budaya tanpa harus jatuh ke dalam pandangan yang *xenophobia* dan etnosentrisme. Multikulturalisme dapat melahirkan tribalisme yang sempit yang pada akhirnya merugikan komunitas itu sendiri di dalam era globalisasi.

Ketiga, proses globalisasi, bahwa globalisasi bisa memberangus identitas dan kepribadian suatu budaya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan dalam diskursus tentang multikulturalisme, Bikhu Parekh (1996) menggarisbawahi tiga asumsi mendasar yang harus diperhatikan dalam kajian ini, yaitu;

Pertama, pada dasarnya manusia akan terikat dengan struktur dan sistem budayanya sendiri dimana dia hidup dan berinteraksi. Keterikatan ini tidak berarti bahwa manusia tidak bisa bersikap kritis terhadap sistem budaya tersebut, akan tetapi mereka dibentuk oleh budayanya dan akan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan budayanya tersebut.

Kedua, perbedaan budaya merupakan representasi dari sistem nilai dan cara pandang tentang kebaikan yang berbeda pula. Oleh karena itu, suatu budaya merupakan satu entitas yang

relatif sekaligus partial dan memerlukan budaya lain untuk memahaminya. Sehingga, tidak satu budaya-pun yang berhak memaksakan budayanya kepada sistem budaya lain.

Ketiga, pada dasarnya, budaya secara internal merupakan entitas yang plural yang merefleksikan interaksi antar perbedaan tradisi dan untaian cara pandang. Hal ini tidak berarti menegaskan koherensi dan identitas budaya, akan tetapi budaya pada dasarnya adalah sesuatu yang majemuk, terus berproses dan terbuka.

Oleh karena itu, tepat kiranya jika Parekh (1996) menulis: *“a culture’s relation to itself shapes and is turn shaped by its relation to others, and their internal and external pluralities presuppose and reinforce each other. A culture cannot appreciate the value of other unless it appreciates the plurality within it”*.

Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih

yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka (Suparlan, 2002)

Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Bank (1989), berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (James A. Bank, 1989).

Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*),

13.000 pulau, dan 5 agama resmi (Suryadinata, dkk., 2003). Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya 3 (tiga) teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982) ketiga teori sosial tersebut adalah: (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity*, (2) *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*, dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (*communal theory*).

Teori pertama, *Melting Pot I: Anglo Conformity*, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang—seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya—harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi

suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya. Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak sangat tidak demokratis.

Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncullah teori kedua, yaitu *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya, maka identitas asli dari ketiga etnik tersebut menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru. Islam Jawa di kraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kejawaan adalah salah

satu contohnya. Teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.

Mengingat teori kedua belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori ketiga, yaitu *Cultural Pluralism : Mosaic Analogy*. Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, Betawi, dan Ambon, misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah.

Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori *Cultural Pluralism :Mosaic Analogy*. Untuk konteks Indoneisa, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Lebih jauh, menurut Jose A. Cardinas (1975), pentingnya pendidikan multikultural ini didasarkan pada lima pertimbangan: (1) *incompatibility* (ketidakmampuan hidup secara harmoni), (2) *other languages acquisition* (tuntutan bahasa lain), (3) *cultural pluralism* (keragaman kebudayaan), (4) *development of positive self-image* (pengembangan citra diri yang positif), dan (5) *equility of educational opportunity* (kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan).

Di pihak lain, Donna M. Gollnick (1983) menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi: (1) bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; (2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini; (3) keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua

orang merupakan hak bagi semua warga negara; (4) distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik; (5) sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis; serta (6) para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.

Dalam pelaksanaannya, Banks (2001) menjelaskan lima dimensi yang harus ada yaitu,

Pertama, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka.

Kedua, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komperhensif keragaman yang ada.

Ketiga, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan.

Keempat, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap element yang beragam.

Kelima, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal

yang kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultur yaitu agar sekolah menjadi element pengentas sosial (transformasi sosial) dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan.

Sementara itu, H.A.R. Tilaar (2002) menggariswahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu,

Pertama, pendidikan multikultural haruslah berdismensi “*right to culture*” dan identitas lokal.

Kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimisasikan budaya local yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional.

Ketiga, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada.

Keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada *xenophobia*, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama.

Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogic pemberdayaan

(*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pembedayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada.

Keenam, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.

Sementara itu, tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam tujuan, yaitu: tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.

Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang

bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.

Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.

Memperhatikan definisi dan tujuan pendidikan multikultural di atas, maka kurikulum pendidikan multikultural seharusnya berisi tentang materi-materi yang dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang suatu fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James A. Bank sebagaimana dikutip Zoran Minderovic (2003) dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu: (a) tahap kontribusi (*contribution level*), (b) tahap penambahan (*additive level*), (c) tahap perubahan (*transformative level*), dan (d) tahap aksi sosial (*social action level*).

Bila pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada

kebudayaan minoritas tertentu, maka pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru, misalnya tema-tema yang terkait dengan multikulturalisme, dengan tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Selanjutnya, bila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi para siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, maka pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak para siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi

Multikulturalisme dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Tema sentral dan fundamental dari agama, terkait dengan isu pendidikan multikultural ini adalah rumusan tentang aqidah (*belief*) atau kepercayaan. Dalam Islam istilah ini disebut sebagai Tauhid (*the Qur'anic monotheism*), dan tauhid ini diyakini sebagai suatu prinsip lengkap yang mampu menembus semua dimensi dan seluruh khazanah fundamental keimanan dan aksi manusia. Sementara bagi kaum sufi, istilah ini sebenarnya adalah takhalli, yaitu sikap pengosongan diri dan pembebasan dari setiap belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah. Pembebasan ini biasanya dimulai dengan al-nafy atau peniadaan dalam fase negatif yaitu tiada Tuhan.

Sementara belenggu itu, dilambangkan dengan konsep tentang

Tuhan atau sesembahan, yaitu setiap obyek ketundukan (Arab ; ilah). Apabila itu diteruskan dengan *al-itsbat* atau peneguhan dalam fase afirmatif, “kecuali Allah” (*Allāh*). Maka yang dimaksudkan adalah kemestian untuk tunduk pada Allah, Tuhan yang sebenarnya itu, dan tidak kepada apa dan siapapun yang lain. Disinilah sebenarnya, problem utama manusia menyangkut soal ketuhanan, bukan ateisme, sebagaimana yang diduga oleh para filosof, tetapi politeisme (*Syirik*).

Karena Allah adalah Wujud yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu apapun (*laysa kamitslibi syay-un*), serta tiada suatu apapun yang sepadan dengan Dia (*wa lam yakun lahū kufiwan abad*), maka tunduk pada Tuhan berarti tunduk dalam maknanya yang dinamis, berupa usaha yang tulus dan murni untuk mencari dan terus menerus mencari kebenaran. Usaha mencari kebenaran inilah sifat kehanifan (*hanīfyyah*) manusia atas dorongan Fitrah atau kejadian asalnya sendiri yang suci. Maka tunduk secara benar, justru akan membawa pada kebebasan dan pembebasan diri dari setiap nilai dan pranata yang membelenggu sukma.

Tuhan tidak mungkin diketahui oleh manusia, sebab Dia tidak akan terjangkau oleh pikiran dan khayalan manusia, maka sesungguhnya keyakinan atau klaim “mengetahui Tuhan” (yang diindikasikan oleh sikap “berhenti mencari”) adalah suatu jenis

pembelengguan diri. Tidak saja karena merupakan *contradiction in terms* (berupa kemustahilan suatu wujud nisbi, seperti manusia dapat menjangkau atau mengetahui Wujud Mutlak, yaitu Tuhan), tetapi juga akan berarti bahwa Tuhan telah disejajarkan dengan apa yang tercapai oleh pikiran kita sendiri. Padahal pikiran itu, tidak akan luput dari dorongan “ego” pikirannya sendiri. Dengan kata lain, keyakinan bahwa dirinya sendiri telah “mengetahui Tuhan” akan berakhir pada penuhanan keinginan diri sendiri atau sikap dan pandangan yang mengangkat keinginan diri sendiri itu sebagai Tuhan. Inilah yang mungkin oleh al-Qur’an digambarkan bahwa ada diantara manusia yang menjadikan *hawâ* atau keinginan dirinya sebagai Tuhan.

Oleh karena itu, al-Qur’an memperingatkan kepada manusia bahwa “*Mereka selalu diliputi oleh kebinaan, dimana saja mereka di temukan, kecuali (jika) mereka berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia*”(QS. Ali Imrân : 111). Ayat ini memperlihatkan akan adanya dua system hubungan yang harus dilakukan oleh manusia, dalam rangka berproses penyempurnaan diri pribadinya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (aspek keberagamaan) dan hubungan manusia dengan sesamanya (aspek kebersamaan).

Pertama, Aspek keberagamaan. Hidup beragama adalah sebuah perwujudan nyata dari sikap *habl min Allâh*, yaitu hubungan manusia dengan

Allah. Dalam beragama, manusia menyatakan sifat kemakhlukannya yang sangat tergantung pada *al-Kbâliq*, yaitu yang terwujud dalam sikap *aslâma*, yaitu penyerahan dan pemasrahan diri kepada Allah yang merupakan aspek asasi, bukan saja bagi hidup keberagamaan, melainkan juga bagi keberaannya.

Meskipun dalam wujud kejadian manusia terkandung aneka kemampuan batin, namun manusia dilahirkan dalam keadaan lemah. Aneka kemampuan batin manusia tersebut harus ditumbuhkembangkan dengan usaha mengenal, mencintai dan mengabdikan pada Allah, sehingga mampu menumbuhkan akhlaq Ilahi dalam dirinya.

Kedua, aspek kebersamaan. Salah satu prinsip dasar yang diajarkan oleh al-Qur’an adalah gagasan tentang kesatuan umat manusia, “*manusia adalah satu umat saja*” (QS. al-Baqârah :213). Tetapi dibalik gagasan kesatuan umat tersebut, al-Qur’an tidak mengecilkan arti bahkan mengakui keniscayaan eksistensial kemajemukan dan keanekaragaman manusia. Marilah kita perhatikan beberapa ayat berikut ini :

“Manusia hanya satu umat saja, kemudian mereka bertikai. Jika tiada ketentuan terdahulu keluar dari Tuhanmu, tentu apa yang mereka perselisihkan, telah diselesaikan antara mereka”. (QS. Yunus : 19)

“Sungguh agama kamu ini, satu agama saja. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Tetapi mereka berpecah

belah dalam persoalan (agama)nya, menjadi beberapa golongan. Tiap golongan bergirang hati pada apa yang ada padanya”. (QS. *Al-Mu'minin* : 52 – 53)

“Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu, bagi Allah, adalah yang paling taqwa diantara kamu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maka sempurna pengetahuan-Nya”. (QS. *Al-Hujurat* : 13).

Ayat-ayat diatas mengemukakan adanya lingkungan-lingkungan maknawi tertentu, baik yang bersifat kesukuan, kekeluargaan dan kebangsaan maupun yang bersifat aliran-aliran pemikiran, keyakinan dan agama (ber-Tuhan). Masing-masing lingkungan tersebut, mempunyai daya pengaruh yang cukup signifikan bagi kelahiran ikatan-ikatan batin, dan tidak jarang pula melahirkan ikatan fisik. Sehingga menimbulkan proses pemiripan dan penyerupaan pada warga dan lingkungannya dalam satu ikatan kelompok tertentu. Dan tidak jarang, daya pengaruh lingkungan tersebut yang sedemikian besar, menimbulkan ekses besar yang negatif dan menghambat pola perkembangan nilai-nilai identitas pribadi.

Hal ini tidak lepas dari dari konsepsi tentang sesuatu, yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, kecenderungan sebuah agama, yang menekankan “keselamatan

individual” dengan Tuhannya, ketimbang “keselamatan kolektif” dengan Tuhannya. Akibatnya, seseorang kurang memiliki rasa kebersamaan dan sensitifitas terhadap sesamanya. Kondisi ini dapat kita rasakan dalam proses pendidikan agama di sekolah-sekolah, yang bersifat doctrinal, monolog, dan dipenuhi dengan muatan formalitas yang cenderung menolak realitas plural dalam ber-Tuhan.

Jika dilihat dari sisi Tuhan, agama memang tunggal dan tidak ada pluralitas disana, karena Tuhan adalah Tunggal dan Mutlak. Tetapi jika dilihat dari aspek turunnya sebuah agama kewilayah manusia, maka agama menyebarkan dalam kehidupan manusia. Hal ini adanya perbedaan relatifitas waktu dan tempat. Sehingga responnya pun disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kondisi historisnya. Maka ketika Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya, untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya (al-Wasayah) kepada seluruh umat manusia, maka akan terjadi perbedaan syir'ah (jalan menuju kebenaran) dan minhaj (cara atau metode perjalanan menuju kebenaran), karena adanya tuntutan ruang dan waktu tersebut (Madjid, 1995). Di sinilah interpretasi manusia ikut berperan dalam menentukan kebenaran, yang tentunya disesuaikan dengan taraf pemahaman dan pengetahuan mereka.

Menurut Hamka (1985), nama Tuhan itu dikenali dalam segala bentuk bahasa. Berbagai nama muncul, menurut

kesanggupan me-rasa dan memahami Tuhan. Namun semua itu, Wujud yang dinamai adalah yang satu itu juga. Bahkan terkadang Tuhan dimonopoli oleh suatu suku, atau suatu bangsa. Padahal segenap risalah (pesan-pesan Tuhan) itu menuju kepada satu sasaran, yaitu mengarahkan tujuan manusia kepada ajaran kesempurnaan. Pokok-pokok risalah dan aqidah pertama dari masing-masing adalah sama, tiada berbeda antara satu dengan yang lainnya (Syaltut, 1994).

Hal inilah yang menjadikan multikulturalisme menjadi sebuah keniscayaan dalam ber-Tuhan, karena ia adalah sunnatullah (aturan Allah), yang tidak akan berubah. Keniscayaan ini, harus dipahami sebagai landasan pengertian mendasar, bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikutnya masing-masing.

Oleh sebab itu, pemaksaan terhadap seseorang atau kelompok, meskipun atas nama Kebenaran sekalipun, bukanlah suatu hal yang bijak. Karena pada diri manusia telah dibekali naluri untuk tunduk kepada Tuhan (fithrah) dan akal, yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu kearah yang baik (taqwa) atau kearah yang buruk (fujûr).

Dengan demikian, absolutisme yang hanya untuk kelompok tertentu, haruslah diganti dengan sikap-sikap yang apresiasif, menghargai dan menghormati pemahaman yang mereka temukan

sendiri. Misalnya “Konsepsi tentang Tuhan saya tidaklah musti sama dengan konsepsi Tuhan orang lain”.

Gagasan tentang kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural adalah dengan menonjolkan beberapa karakter sebagai berikut;

Pertama kurikulum pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menonjolkan pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Tentunya, ini masih menjadi pertanyaan, apakah sistem pendidikan seperti ini betul-betul mampu membongkar sakralitas ilmu-ilmu keagamaan dan dikhotomi keilmuan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan.

Kedua ;Pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagaman. Kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik. Tentunya, kesadaran tersebut tidak lahir begitu saja, namun mengalami proses yang sangat panjang, sebagai realitas

pemahaman yang komprehensif dalam melihat suatu fenomena.

Ketiga, Pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya “mimbar bebas”, dengan memberikan kesempatan kepada semua civitas untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya, sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Di sisi yang lain, akan membudayakan “reasoning” bagi civitas di lembaga pendidikan Islam.

Perlunya membentuk pendidikan Islam berbasis multikulturalisme tersebut, sekali lagi merupakan suatu inisiasi yang lahir dari realitas sejarah pendidikan khususnya di Indonesia yang dianggap gagal dalam membangun citra kemanusiaan. Dimana umumnya, pendidikan umum hanya mencetak orang-orang yang pintar namun tidak mempunyai integritas keilmuan dan akhlaq ilmun. Ini yang kemudian melahirkan para koruptor yang justru menjadi penyakit dan menyengsarakan bangsa ini. Di satu sisi, pendidikan agama yang ada hanya menciptakan ahli agama yang cara berpikirnya parsial dan sempit. Akhirnya, semakin banyak orang

pinter ilmu agama semakin kuat pertentangan dan konflik dalam kehidupan. Inilah sistem pendidikan yang gagal dalam menciptakan citra kemanusiaan.

Untuk merealisasikan cita-cita kurikulum pendidikan yang mencerdaskan seperti tersebut, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan sistem pengajaran yang berorientasi pada penanaman kesadaran pluralisme dalam kehidupan. Adapun beberapa program pendidikan yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme adalah: pendidikan sekolah harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (*frame work*) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya (UNESCO, 1981).

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum PAI yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis satu dengan lain, dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum multikul-

turalimesebagai proses ini, yaitu; (1) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa, (4) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Bentuk kurikulum dalam pendidikan agama Islam hendaknya tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan bersama. Bila selama ini setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SLTP memperoleh materi agama yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kurikulum, penulis *textbook* dan guru untuk mengembangkan kurikulum PAI berbasis pluralisme di Indonesia, adalah sebagai berikut; *Pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi

yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifme, dan rekontruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

Kedua, teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan ketrampilan yang harus dimiliki generasi muda.

Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

Keempat, proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

Kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternatif assesment (portfolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah itu, untuk menuju sebuah kurikulum PAI yang menghargai multikulturalisme dan pluralisme, sebenarnya selain aspek kurikulum yang harus didesain, sebagaimana telah penulis uraikan, aspek pendekatan dan pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan

komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan “manusia yang unik” (*human unique*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-peyeragaman. Dalam prespektif ini, pendidikan agama Islam yang memberikan materi kajian perbandingan agama dan nilai-nilai prinsip Islam seperti; toleransi, keadilan, kebebasan dan demokrasi—untuk memperoleh suatu pemahaman di antara orang-orang yang berbeda iman itu—adalah sebuah keniscayaan.

Kesimpulan

Berbagai kasus kemanusiaan yang sementara ini tampak di hadapan kita merupakan salah satu fenomena gejala minimnya aktualisasi kesadaran akan multikulturalisme yang selama ini melulu diperbincangkan secara panjang lebar di atas langit dan sangat sedikit sekali berhubungan dengan hal-hal yang bersifat antroposentris.

Pendidikan multikultural membawa misimembumikan kesadaran bersama tentang adanya berbagai etnis, budaya, bahasa, suku dan agama.

Dalam konteks Islam, ini relevan dengan tugas kemanusiaan sebahai hamba dan *kebalifah*. Tugas kehambaan manusia secara niscaya tidak dapat menafikan realita yang ada di sekitarnya. Sedang martabat kekhalfahannya menuntut aktualisasi ide-ide ketuhanannya dalam praktek

kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun pemahaman keagamaan umat mengenai ketuhanan akan bermuara pada satu tujuan, yaitu membentuk watak dan tabiat manusia yang memiliki sikap mental dan perilaku yang baik (*al-akhlak al-karimah*), manusia yang bermoral, dan memiliki etika serta sopan santun, baik terhadap diri pribadi, orang lain, lingkungan, dan tentunya terhadap Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi *paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: IRCiSod, 2004)
- Bikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000)
- _____. "What is Multiculturalism?" dalam *Jurnal India Seminar*, Desember 1999. Raz J.. *Ethics in Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics* (Oxford: Clarendon Press, 1996)
- Charles Taylor. "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman. *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994)
- Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. (London : The CV Mosby Company, 1983)
- Gregory Jay. "Critical Contexts For Multiculturalism" dalam <http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm>, download 2 Desember 2005
- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002)
- James A Banks, (ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989)
- James A. Bank dan Cherry A. McGee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001)

- James Lynch, *Multicultural Education: Principles and Practice*. (London: Routledge & Kegan Paul, 1986)
- Jose A. Cardinas *Multicultural Education: A Generation of Advocacy*. (America: Simon & Schuster Custom Publishing, 1975)
- Kymlica W.. Multicultural, *Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995)
- Lawrence J. Saha, (eds), *International Encyclopedia of the Sociology of Education*. New York: Pergamon, 1997).
- Leo Suryadinata, dkk. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 2003)
- Mark K. Smith. 2002. *Curriculum Theory and Practice*, dalam <http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm>
- Scott Lash dan Mike (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002)
- Steve Fuller, "Social Epistemology as a Critical Philosophy of Multiculturalism" dalam Ram Mahalingan dan Cameron McCarthy, *Multiculturalism Curriculum*, 2002.
- Raz J.. *The Morality of Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1986)
- Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002),
- Ricardo L. Garcia. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. (New York: Harper & Row Publisher. 1982)
- Usman Pelly dan Asih Minanti, *Tiori- tiori Sosial Budaya* (Jakarta: Dirjen Pendidikan dan Budaya, 1994)
- Sonia Nieto. *Language, Culture and Teaching* (Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002)
- Zoran Minderovic,. 2003. Multicultural Education/Curriculum, dalam <http://www.findarticle.com/92602/0003/2602000388/p1/article.jhtml?term=pluralism>.
- S. Hamid Hasan, "Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional" dalam *Makalah academe@indopubs.com*